

TINGKAT KESIAPAN MASYARAKAT BALIKPAPAN DALAM PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA

(*LEVEL OF BALIKPAPAN COMMUNITY READINESS ON IKN NUSANTARA DEVELOPMENT*)

Damar Paramananda, Doddy Aditya Iskandar

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika No. 2, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta
Email: damarparamananda@mail.ugm.ac.id

Diterima: 14 November 2023; Direvisi: 23 Desember 2024; Disetujui: 27 Desember 2024

ABSTRAK

Balikpapan sebagai salah satu daerah penyangga IKN Nusantara memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan karena hampir seluruh infrastruktur pendukung untuk pembangunan IKN Nusantara terdapat di Balikpapan. Wilayah Kariangau, Karang Joang, dan Teritip yang merupakan kelurahan yang berbatasan langsung dengan IKN Nusantara diharapkan dapat berperan sebagai pendukung IKN. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat abduktif. Adapun metode pengumpulan data dengan *in-depth interview*, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan masyarakat di ketiga kelurahan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat di Kelurahan Karang Joang merupakan masyarakat yang paling siap terhadap pembangunan IKN di mana masyarakat di kelurahan ini cenderung didominasi kegiatan yang mengarah pada sektor *post-industry*, sedangkan masyarakat di Kelurahan Kariangau masih transisi menuju sektor *industrial*, sementara itu, masyarakat di Kelurahan Teritip masih dominan pada kegiatan *pre-industry*. Secara komprehensif, masyarakat memiliki tingkat kesiapan yang relatif masih rendah. Kelurahan Karang Joang menjadi wilayah yang paling siap terhadap pembangunan IKN dengan tingkat kesiapan masyarakat yang berada di tahap *Initiation*. Sementara itu, Kelurahan Kariangau berada pada peringkat kedua di mana tingkat kesiapan masyarakat di wilayah ini berada di tahap *Preparation*. Sedangkan Kelurahan Teritip merupakan wilayah yang paling belum siap menghadapi pembangunan IKN di mana tingkat kesiapan masyarakat di kelurahan ini berada di tahap *Preplanning*.

Kata kunci: Kesiapan, Masyarakat, Balikpapan, Penyangga, IKN

ABSTRACT

Balikpapan as one of the buffer areas for the IKN Nusantara has a lot of potential that can be developed because almost all the supporting infrastructure for the development of the IKN is in Balikpapan. Kariangau, Karang Joang, and Teritip, sub-districts which directly border the IKN Nusantara are expected to play a role as support system of IKN Nusantara. This research is a case study with an abductive qualitative approach. The data collection methods include in-depth interviews, field observations, documentation, and literature studies. The results show that the level of community readiness in the three sub-districts, it can be seen that the community in Karang Joang is the community that is most ready for the development of the IKN where the community in this sub-district tends to be dominated by activities that lead to the post-industry sector, while the community in Kariangau is still transitioning towards an industrial sector, meanwhile, the community in Teritip is still dominant in pre-industry activities. Comprehensively, the community has a relatively low level of readiness. Karang Joang is the area that is most ready for the development of the IKN with a level of community readiness at the Initiation stage. Meanwhile, Kariangau is in second place where the level of community readiness in this area is at the Preparation stage. Meanwhile, Teritip is the area that is least ready to face the development of the IKN where the level of community readiness in this sub-district is at the Preplanning stage.

Keywords: Readiness, Community, Balikpapan, Buffer, IKN

PENDAHULUAN

Pembangunan Ibu Kota Negara merupakan hal krusial yang memunculkan berbagai macam permasalahan sosial, salah satunya masyarakat pada daerah penyangga eksisting. Oleh karenanya, diperlukan identifikasi terhadap aspek sosial sebagai bentukantisipasi dan menangkap potensi dari keberadaan IKN. Segala bentuk implikasi, pengaruh, dan peluang atas pembangunan IKN tentu akan memicu *multiplier effect* yang berdampak pada daerah penyangganya, salah satunya Kota Balikpapan. Secara administratif, kawasan penyangga IKN di Kota Balikpapan terdiri dari 3 wilayah kelurahan, yakni kelurahan-kelurahan yang secara langsung berbatasan dengan Daerah Administrasi IKN, di antaranya Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karang Joang, dan Kelurahan Teritip. Seiring dengan pembangunan IKN, fungsi-fungsi ruang yang awalnya diemban oleh ketiga kelurahan ini tentu akan meningkat, menjadi fungsi baru yang mendukung kegiatan IKN. Hal ini dapat dijadikan momentum kemajuan pembangunan sosial di kawasan penyangga IKN yang notabene merupakan wilayah terluar Kota Balikpapan.

Kota Balikpapan merupakan wilayah di sekitar IKN Nusantara yang paling memiliki berbagai macam keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya yang mana berpotensi memaksa Kota Balikpapan menjadi tumpuan IKN dan bagian yang tidak terpisahkan dari IKN itu sendiri. Secara geografis, Kota Balikpapan memiliki lokasi yang sangat strategis serta memiliki kelengkapan infrastruktur seperti Bandara, Pelabuhan, Jalan Tol, Jalan Poros Balikpapan-Samarinda, sarana dan prasarana, serta infrastruktur penunjang lainnya membuat Kota Balikpapan menjadi kunci pengembangan IKN. Namun, kelengkapan infrastruktur dan luasan kawasan perkotaan di Kota Balikpapan hanya terkonsentrasi di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 menjelaskan bahwa Pusat Pelayanan Kota (PPK) Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Kota yang mana memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala kota sehingga wilayah yang berada di sekitarnya juga turut merasakan dampaknya. Sementara itu, pada kawasan terluar Kota Balikpapan cenderung tertinggal, padahal kawasan tersebut nantinya akan berperan sebagai jembatan antara IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan,

PSPPR (2020) mengemukakan bahwa perubahan status pemerintahan juga akan menimbulkan perubahan sosio-kultural terkait karakteristik kedesaan yang berubah menjadi karakteristik kekotaan. Masyarakat yang semula masih hidup dengan cara-cara tradisional harus dihadapkan pada kondisi yang lebih modern. Masyarakat harus siap untuk menghadapi perkembangan teknologi dan pendidikan yang akan masuk ke desa-desa. Proses ini juga akan berpengaruh terhadap sistem status dan peran di masyarakat. Bekerja di sektor non-pertanian kemungkinan akan dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja di sektor pertanian. Proses asimilasi antara pendatang dan penduduk setempat juga menjadi poin penting yang harus menjadi perhatian. Mulusnya proses asimilasi akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bersama. Muta'ali dan Sahamony (2019), menyebutkan bahwa karakteristik masyarakat merupakan komponen yang memiliki pengaruh dalam menunjang efektivitas pembangunan Ibu Kota Negara.

Keberadaan IKN yang berbatasan langsung dengan ketiga kelurahan tersebut nantinya akan memunculkan peluang bagi masyarakat setempat untuk ikut menikmati kue ekonomi yang muncul dari aliran investasi besar-besaran yang akan masuk, serta munculnya berbagai macam lapangan kerja baru yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Namun demikian, hal tersebut sekaligus juga akan mengubah konfigurasi dan perkembangan gradual yang sedang dinikmati masyarakat menjadi sebuah ketidakpastian yang melanda kehidupan di kawasan setempat karena *influx* migran dan kapital yang cukup besar dalam waktu pendek. Berdasarkan

penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan masyarakat di kawasan penyangga Ibu Kota Negara di Kota Balikpapan sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi yang relevan untuk pengembangan masyarakat yang ada di kawasan penyangga IKN.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat abduktif. Penelitian ini dilandasi atas permasalahan yang sedang terjadi di lokasi kajian yang diinterpretasi dan disampaikan secara naratif yang terperinci mengenai persepsi, pemahaman, ataupun penuturan para partisipan yang terlibat dalam penelitian ini. Menurut Yin (2011), penelitian studi kasus menginvestigasi fenomena yang kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas antara fenomena dengan konteks kurang jelas, dan upaya untuk menjelaskannya dengan menggunakan berbagai macam bukti. Proses abduksi berangkat dari membangun teori berdasarkan reduksi data empiris dari kasus.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi studi literatur, pengumpulan data instansional, observasi lapangan, dan *in-depth interview*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari *checklist* hasil observasi, data hasil wawancara, dan dokumentasi yang bersifat kualitatif yang kemudian dilakukan triangulasi data sebagai bahan analisis kesiapan masyarakat. Data sekunder terdiri atas data instansional berupa data statistik dan data spasial yang dipergunakan untuk memperkuat temuan mengenai persepsi dari para responden dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang direpresentasikan oleh penduduk ada kawasan penyangga IKN di Kota Balikpapan, yakni Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karang Joang, dan Kelurahan Teritip. Tiap kelurahan diwakilkan oleh Pemerintah Kelurahan sebagai narasumber kunci untuk menghimpun induk informasi secara komprehensif pada masing-masing kelurahan, kemudian disusul oleh pihak Puskesmas, tokoh agama/tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua RT, pemuda, dan masyarakat umum yang tersebar baik pada jalan utama, jalan perdesaan, hingga pada kawasan terluar pada masing-masing kelurahan. Kriteria penentuan narasumber pada lokasi penelitian mengacu pada keterwakilan klaster permukiman, usia, jenis kelamin, suku, profesi, hingga pengaruh narasumber terhadap wilayahnya. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dilakukan triangulasi data, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Tahapan ini menjelaskan hasil analisis serta temuan temuan dalam penelitian yang terdiri dari kesiapan masyarakat berdasarkan tujuan penelitian

Menurut Plested et. al. (2006), kesiapan masyarakat adalah sejauh mana suatu masyarakat siap mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan. Kesiapan masyarakat sendiri bersifat spesifik terhadap suatu permasalahan. Sintesis teori melalui proses abduksi didapatkan berdasarkan hasil penelitian dengan mengacu Model Kesiapan Masyarakat Plested et. al (2006) terkait parameter dalam Dimensi Tingkat Kesiapan Masyarakat. Dari 6 Dimensi Kesiapan Masyarakat kemudian dapat diturunkan dalam parameter. Parameter tersebut dilampirkan pada tabel Dimensi Kesiapan Masyarakat yang turunan parameter yang telah ditentukan dari hasil konstruksi penulis dengan mengacu pada Model Kesiapan Masyarakat Plested et. al. (2006). Turunan parameter terpilih digunakan untuk mengkuantifikasi Tingkat Kesiapan Masyarakat di masing-masing kelurahan. Berikut ini adalah penjabaran dari Dimensi Kesiapan Masyarakat berdasarkan proses abduksi yang telah dikonstruksi oleh penulis.

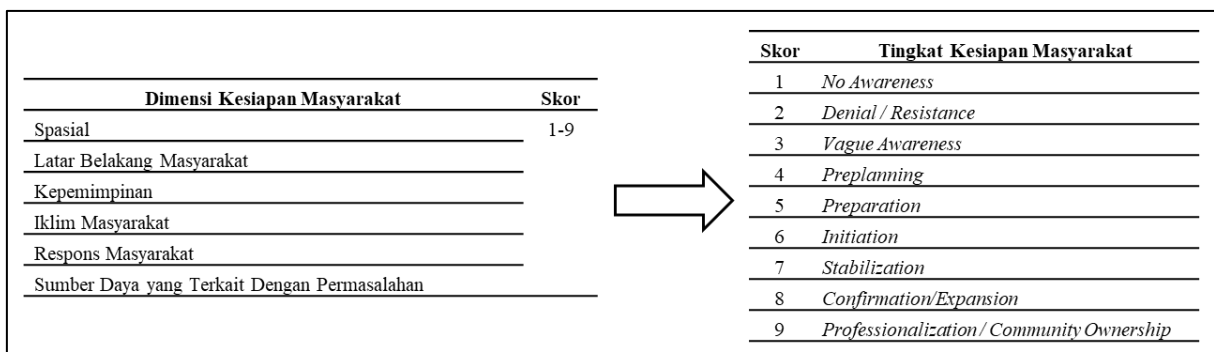
Berdasarkan Tabel 1, untuk menentukan tingkat kesiapan masyarakat, diperlukan interpretasi oleh peneliti yang kemudian dikuantifikasi menggunakan skor yang mengacu pada Model Tahapan Kesiapan Masyarakat oleh Plested et. al. (2006). Hasil yang telah dikuantifikasi kemudian direkap menjadi *individual scores* melalui perhitungan skor gabungan dibagi total *combined scores* dengan jumlah narasumber. Tingkat kesiapan dihitung untuk masing-masing

dari 6 dimensi dengan skor 1-9. Dengan demikian, setiap dimensi dapat berada pada tingkat kesiapan masyarakat yang berbeda-beda. Adapun alur tahapan untuk menentukan tingkat kesiapan masyarakat sebagaimana pada Gambar 1.

Tabel 1 Dimensi Kesiapan Masyarakat

Dimensi Kesiapan Masyarakat	Parameter
Spasial	Jarak Terhadap Kawasan Pusat Pemerintahan IKN
	Jarak Terhadap Pusat Kota Balikpapan
	Aksesibilitas dan Konektivitas
	Mobilitas Penduduk
	Infrastruktur Penunjang
Latar Belakang Masyarakat	Matapencaharian Masyarakat
	Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Tipikal Masyarakat Desa atau Kota
	Pendapatan Masyarakat
Kepemimpinan	Pengaruh Sektor Terhadap Pendapatan
	Peran Pemimpin atau Tokoh Masyarakat
	Kemampuan Memahami Masalah
	Kontrol Masyarakat
Iklim Masyarakat	Keterlibatan
	Pengaruh Terhadap Masyarakat
	Karakteristik Masyarakat
	Heterogenitas Masyarakat
	Komposisi Masyarakat
Respons Masyarakat	Potensi Konflik
	Partisipasi Masyarakat
	Pengetahuan Masyarakat Mengenai Permasalahan
	Tingkat Keingintahuan
	Kekhawatiran Masyarakat
Sumber Daya yang Terkait Dengan Permasalahan	Upaya Masyarakat
	Akses dan Penyebaran Informasi
	Sumber Daya Alam
	Sumber Daya Manusia
	Kondisi Perekonomian Masyarakat
	Potensi Wilayah
	Aset Masyarakat dan Pengelolaannya

Sumber: Konstruksi Penulis, 2023



Gambar 1 Diagram Alir Mekanisme Pengukuran Tingkat Kesiapan Masyarakat

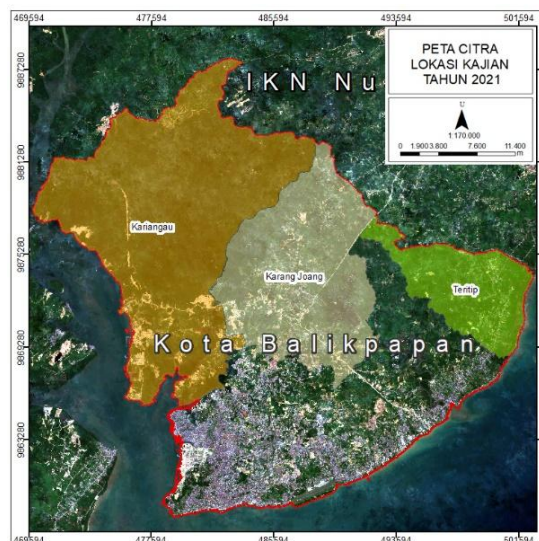
Sumber: Konstruksi Penulis, 2023

Tingkat kesiapan masyarakat dipengaruhi 6 dimensi di atas yangmana menghasilkan perbedaan antara situasi atau perilaku saat ini dan keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Tingkat kesiapan masyarakat dapat berbeda-beda pada berbagai segmen masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung suatu permasalahan mungkin jauh lebih siap menghadapi permasalahan ini dibandingkan kelompok lainnya yang tidak terlalu terkena dampaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kesiapan masyarakat merupakan kondisi individu untuk memberikan respon dalam cara tertentu terhadap suatu permasalahan. Dengan demikian, suatu kesiapan merupakan pondasi dasar bagi peneliti, perencana, hingga masyarakat itu sendiri dalam menindaklanjuti terkait kegiatan yang akan dilakukan ke depannya, tidak terkecuali untuk kasus pembangunan Ibu Kota Negara. Tingkat kesiapan masyarakat dipengaruhi oleh perbedaan antara situasi atau perilaku saat ini dan keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Tingkat kesiapan masyarakat dapat berbeda-beda pada berbagai segmen masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung suatu permasalahan mungkin jauh lebih siap menghadapi permasalahan ini dibandingkan kelompok lainnya yang tidak terlalu terkena dampaknya. Secara spasial, kelompok masyarakat terdekat, memiliki akses terbaik, dan memiliki konektivitas dari sumber permasalahanlah yang paling terkena dampaknya secara langsung, sedangkan kelompok masyarakat yang berlokasi paling jauh dan tidak memiliki akses atau konektivitas yang baik dari sumber masalah adalah yang paling minim terkena dampaknya. Hal ini cukup krusial dalam memastikan bahwa intervensi pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian yang seimbang terhadap dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat lokal sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur yang merata, penyesuaian kondisi geografis dan demografis, pemantauan kebutuhan masyarakat, dan pertimbangan ketersediaan sumber daya.

Hasil penelitian menunjukkan disparitas spasial antara lokasi penelitian dengan kawasan perkotaan di Kota Balikpapan di mana didominasi oleh *built-up area* atau lahan terbangun. Sementara itu, pada lokasi penelitian, yakni di ketiga kelurahan terluar di Kota Balikpapan masih didominasi oleh vegetasi dan minim adanya *built-up area*, kecuali di sepanjang jalan utama. Selain itu, keterbatasan jaringan jalan di ketiga kelurahan ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya konektivitas antarwilayah dan buruknya aksesibilitas di wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepadatan penduduk yang ada di ketiga wilayah tersebut.



Gambar 2 Citra Lokasi Kajian Tahun 2021
Sumber: Paramananda, 2023

Citra pada Gambar 2 menunjukkan bahwa beban hanya terfokus di pusat kota, yakni di wilayah selatan, khususnya di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Tengah, sedangkan di wilayah terluar, yakni di bagian utara masih didominasi oleh rural area dan minim lahan terbangun. Semakin beratnya beban yang diemban di wilayah selatan, cepat atau lambat akan meluas ke arah utara. Secara otomatis, jalan utama yang memiliki status atau peran paling tinggi akan paling cepat mengalami pertumbuhan, dalam kasus ini Jl. Soekarno-Hatta di Kelurahan Muara Rapak hingga Kelurahan Karang Joang yang merupakan Jalan Poros Balikpapan-Samarinda yangmana untuk sementara waktu ini merupakan salah satu jalan utama yang paling sering ditempuh untuk menuju ke IKN, selain melalui jalan tol. Kemudian Jl. Sultan Hasanuddin di Kelurahan Kariangau yang nantinya akan terhubung dengan Jembatan Pulau Balang yangmana menghubungkan Kota Balikpapan dengan IKN Nusantara. Terakhir Jl. Mulawarman di Kelurahan Manggar hingga Kelurahan Teritip yang hanya sebatas jalan provinsi yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan bagian pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara atau nantinya menjadi Kawasan Pengembangan IKN (WP 7 dan WP 8 IKN). Secara spasial, berdasarkan kondisi eksisting ini sudah dapat diinterpretasi bahwa tingkat kesiapan masyarakat terhadap pembangunan IKN sejalan dengan pertumbuhan yang terdapat di ketiga jalan tersebut yang masing-masing melintasi Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karang Joang, maupun Kelurahan Teritip. Hal ini membuktikan bahwa dimensi spasial sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesiapan masyarakat.

Tingkat kesiapan masyarakat terdiri dari 6 dimensi yang menjadi dasar tingkat kesiapan masyarakat itu sendiri secara komprehensif. Apabila ada parameter yang tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi tingkat kesiapan masyarakat. Dari 6 dimensi tersebut masing-masing kelurahan memiliki skor yang berbeda sesuai dengan kondisi umum dan karakteristik masyarakatnya. Berdasarkan interpretasi peneliti yang mengacu pada hasil triangulasi data, maka dapat ditetapkan tingkat kesiapan masyarakat di ketiga kelurahan yang menjadi kawasan penyangga IKN di Kota Balikpapan. Tabel 2 menunjukkan hasil identifikasi tingkat kesiapan masyarakat di ketiga kelurahan tersebut.

Tabel 2 Penghitungan Tingkat Kesiapan Masyarakat di Lokasi Kajian

Lokasi Kajian	Dimensi Kesiapan	Skor Dimensi	Skor Keseluruhan (Stage Score)	Skor Kalkulasi (Calculated Score)	Klasifikasi Tingkat Kesiapan Masyarakat
Kelurahan Kariangau	Spasial	4	30	5	Preparation
	Latar Belakang Masyarakat	5			
	Kepemimpinan	5			
	Iklim Masyarakat	6			
	Respons Masyarakat	5			
	Sumber daya yang terkait permasalahan	5			
Kelurahan Karang Joang	Spasial	6	36	6	Initiation
	Latar Belakang Masyarakat	6			
	Kepemimpinan	5			
	Iklim Masyarakat	6			
	Respons Masyarakat	6			
	Sumber daya yang terkait permasalahan	7			
Kelurahan Teritip	Spasial	3	25	4	Preplanning
	Latar Belakang Masyarakat	4			
	Kepemimpinan	4			
	Iklim Masyarakat	6			
	Respons Masyarakat	3			
	Sumber daya yang terkait permasalahan	5			

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Nilai *stage score* menunjukkan jumlah tiap Dimensi Kesiapan dari masing-masing kelurahan. *Stage score* digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kesiapan masyarakat dari masing-masing kelurahan. *Stage score* dibagi dengan jumlah Dimensi Kesiapan Masyarakat untuk mengetahui nilai akhir Tingkat Kesiapan Masyarakat terhadap pembangunan IKN. Hasil perhitungan dibulatkan ke bawah. Berikut ini merupakan perhitungan *calculated score*.

TOTAL *Calculated Score*: $Stage Score \div 6$ (Dimensi) = Tingkat Kesiapan Masyarakat
TOTAL *Calculated Score* di Kelurahan Kariangau: $30 \div 6 = 5$
TOTAL *Calculated Score* di Kelurahan Karang Joang: $36 \div 6 = 6$
TOTAL *Calculated Score* di Kelurahan Teritip: $25 \div 6 = 4$

Terdapat perbedaan karakteristik masyarakat pada ketiga kelurahan tersebut. Secara umum, masyarakat di Kelurahan Karang Joang yang paling siap terhadap pembangunan IKN di mana masyarakat di kelurahan ini mulai mengarah pada sektor perdagangan dan jasa, sedangkan masyarakat di Kelurahan Kariangau masih transisi menuju masyarakat industrial, sementara itu, masyarakat di Kelurahan Teritip masih berfokus pada kegiatan *pre-industry* seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Semakin masyarakat bergerak di bidang yang mengarah ke kegiatan *post-industry* maka akan semakin siap untuk menghadapi pembangunan IKN, sedangkan masyarakat yang mulai berkecimpung di sektor industrial relatif tidak siap masyarakat yang telah berada pada kegiatan yang mengarah ke *post-industry*, tetapi berpotensi terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan IKN. Sebaliknya, masyarakat yang masih cenderung bergerak di sektor yang masih *pre-industry* akan lebih sulit untuk menyesuaikan dampak dari adanya pembangunan IKN.

Terlebih lagi, dimensi spasial juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesiapan masyarakat yang ada di ketiga kelurahan ini. Lokasi Kelurahan Karang Joang merupakan yang paling strategis karena dilalui oleh Jalan Poros Balikpapan-Samarinda dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang keduanya merupakan akses utama mobilitas dari maupun menuju Kawasan Pusat Pemerintahan IKN, sedangkan Kelurahan Kariangau belum terlalu merasakan dampaknya karena masih belum terhubung melalui jalur darat, tetapi mobilitas melalui akses laut cukup tinggi karena terdapat Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) yang merupakan pelabuhan peti kemas dan logistik utama dalam menunjang pembangunan IKN. Sementara itu, Kelurahan Teritip yang lokasinya paling jauh dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, belum mendapatkan manfaat maupun dampak dari keberadaan IKN.

Meskipun terdapat perbedaan karakteristik dan tingkat kesiapan masyarakat terhadap pembangunan IKN, akan tetapi terdapat persamaan antara masyarakat di ketiga kelurahan, yakni masyarakat di ketiga kelurahan tersebut merupakan masyarakat perdesaan, bahkan mereka sendiri mengakui bahwa mereka merupakan masyarakat desa. Masyarakat menyadari bahwa kondisi wilayahnya merupakan *rural area* dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah dan mayoritas penduduknya bermatapencaharian di sektor primer dan cenderung tradisional, kecuali mereka yang bekerja di sektor industri. Masyarakat juga sering berasumsi bahwa mereka tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat di kecamatan lain seperti Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Kota. Masyarakat selalu beranggapan bahwa peneliti berasal dari kota, sedangkan mereka menganggap bahwa mereka merupakan masyarakat desa dan terdapat kecenderungan mereka menyebut dirinya sebagai masyarakat "Balikpapan Desa" atau masyarakat desa di Kota Balikpapan. Padahal secara administratif mereka juga merupakan bagian dari Kota Balikpapan, yang mana seluruh unit administrasi di bawah kecamatan merupakan kelurahan, tidak ada satupun desa. Hal ini membuktikan bahwa kesenjangan spasial antara wilayah selatan Kota Balikpapan dengan wilayah utara cukup parah. Dengan demikian, dimensi spasial berupa jarak terhadap Kawasan Pusat Kota Balikpapan dan Kawasan Pusat Pemerintahan IKN secara eksplisit memberi gambaran tentang tingkat kesiapan masyarakat di ketiga kelurahan ini.

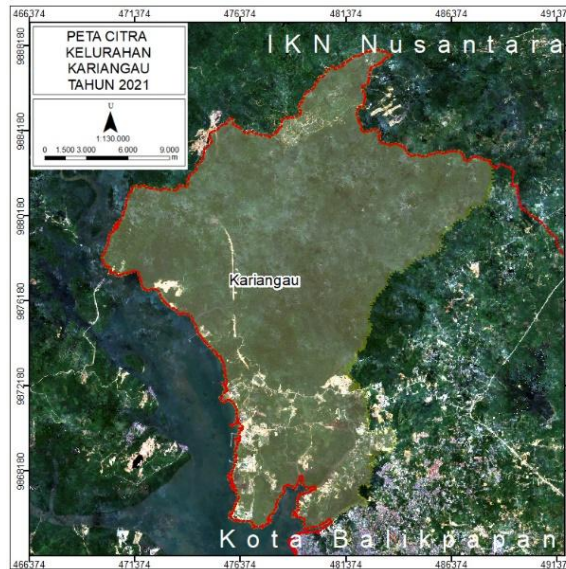
Dengan adanya isu pembangunan IKN, peneliti mendapat berbagai hal menarik terkait dengan transformasi kehidupan masyarakat yang sudah mulai beralih ke sektor industri dalam rangka merespons pembangunan IKN. Masyarakat di Kelurahan Kariangau memiliki karakteristik masyarakat perdesaan yang mayoritas bergerak di sektor industri, jasa, dan perikanan. Masyarakat di kelurahan ini tengah berada pada fase transisi dari masyarakat *pre-industry* menuju industrial seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang semakin bertambah tiap tahunnya menuntut masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan kompetensinya. Masyarakat yang ada di Kelurahan Kariangau satu tahap lebih siap jika dibandingkan dengan Kelurahan Teritip. Namun pada tahapan ini masih terdapat keterbatasan informasi terkait dengan rencana IKN sehingga masih terdapat pro dan kontra terhadap aktivitas yang ada tetapi tidak berdasarkan pengumpulan data secara formal. Namun demikian hanya sedikit yang kontra, itupun tidak berpengaruh terhadap apapun. Hanya saja sedikit mendorong sikap apatis hingga pesimistis masyarakat terhadap pembangunan IKN. Adapun peran tokoh masyarakat cukup aktif tetapi pengambilan keputusan hanya dibuat berdasarkan apa yang akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Sumber daya manusia yang ada mulai berkontribusi secara aktif sehingga iklim masyarakat mulai menawarkan bantuan berupa upaya terhadap sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan IKN.

Jauhnya jarak antara Kelurahan Kariangau dengan pusat kota yang diiringi dengan buruknya aksesibilitas di Kelurahan Kariangau membuat mobilitas di Kelurahan Kariangau sangat rendah. Jarak dari Kelurahan Kariangau menuju pusat kota di Kecamatan Balikpapan Kota sendiri tergolong jauh, yakni berkisar 21 km. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Kelurahan Kariangau sulit berkembang dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat. Hingga saat ini, Kelurahan Kariangau masih menjadi satu-satunya wilayah di Kota Balikpapan yang tidak memiliki fasilitas transportasi publik, bahkan trayek angkot juga tidak menjangkau kelurahan ini. Hal ini juga menjadi faktor penghambat mengapa Kelurahan Kariangau tidak *accessible* sehingga diperlukan adanya perluasan akses transportasi publik di Kota Balikpapan. Padahal keberadaan infrastruktur jalan dan transportasi yang baik dapat menjadi daya dukung kawasan dalam menunjang berbagai kegiatan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi di kelurahan ini, terlebih jika dapat diintegrasikan dengan keberadaan Kawasan Industri Kariangau. Menurut Bagus (2019), salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur yang mana dipandang sebagai motor pembangunan nasional maupun daerah, terlepas dari bagaimana pembiayaan publik atau swasta didistribusikan. Infrastruktur juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, Kelurahan Kariangau masih memiliki banyak permasalahan fisik yang tidak kunjung diatasi, seperti buruknya aksesibilitas, lemahnya konektivitas, tidak adanya rute transportasi umum, rendahnya mobilitas, terbatasnya fasilitas pendidikan, tidak tersedianya fasilitas perdagangan, dan minimnya infrastruktur pendukung di Kelurahan Kariangau menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat di Kelurahan Kariangau sedikit terbelakang. Terlebih ketika semakin banyaknya perusahaan yang masuk seiring pengembangan Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) yang dirasa masih kurang menyerap tenaga dari masyarakat Kelurahan Kariangau hanya akan semakin meningkatkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi di kelurahan ini. Hal inilah yang menghambat tingkat kesiapan masyarakat terhadap pembangunan IKN. Sejauh ini masyarakat cenderung dirugikan dengan adanya ekspansi industri yang semakin masif tetapi kurang mengakomodasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kelurahan Kariangau.

Kelurahan Kariangau merupakan Kawasan Penyangga IKN yang lokasinya paling dekat dengan IKN. Namun, hingga saat ini Kelurahan Kariangau hanya dapat terhubung dengan akses

laut sehingga dampak secara langsung dari adanya IKN belum begitu dirasakan oleh wilayah Kelurahan Kariangau. Apabila menggunakan akses darat untuk menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN harus menempuh jarak sejauh 88 km. Hal ini disebabkan karena belum beroperasinya Jembatan Pulau Balang mengakibatkan Kelurahan Kariangau tidak memiliki akses darat secara langsung dengan wilayah IKN Nusantara.



Gambar 3 Citra Kelurahan Kariangau Tahun 2021
Sumber: Paramananda, 2023

Berdasarkan citra pada Gambar 3, dapat diidentifikasi bahwa wilayah Kelurahan Kariangau masih didominasi oleh vegetasi, bahkan hanya sebagian kecil saja yang terdapat lahan terbangun. Jaringan jalan yang ada di Kelurahan Kariangau juga sangat terbatas. Jaringan jalan yang ada di kelurahan ini masih bermuara di Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) dan pelabuhan-pelabuhan milik sejumlah perusahaan. Kebuntuan ini tentunya menjadi salah satu penghambat bagi masyarakat di luar Kelurahan Kariangau untuk bermukim atau migrasi ke wilayah kelurahan ini. Sejauh ini migrasi masuk hanya dilakukan oleh mereka yang berkepentingan maupun yang bekerja di perusahaan yang ada di Kelurahan Kariangau. Berbeda halnya jika nantinya ada jalan penghubung antara Kelurahan Kariangau dengan IKN Nusantara melalui Jembatan Pulau Balang ataupun jembatan yang menghubungkan Kelurahan Kariangau dengan wilayah Kecamatan Balikpapan Barat tanpa harus menempuh jarak yang cukup jauh melalui Jl. Soekarno-Hatta di Kecamatan Balikpapan Utara. Konektivitas ini diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Kariangau yang tentunya juga berdampak pada tingkat kesiapan masyarakat terhadap pembangunan IKN.

Secara umum mayoritas masyarakat merespons pemindahan IKN secara positif, hanya saja masih terdapat beberapa masyarakat yang apatis. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa wilayahnya akan berbatasan secara langsung dengan Daerah Administrasi IKN Nusantara. Terbatasnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat menyebabkan mereka menunggu arahan dari pemerintah, dan OPD terkait, serta sejumlah lembaga resmi. Sejauh ini masyarakat hanya mengandalkan CSR maupun dorongan dari lembaga hingga tokoh masyarakat dalam melakukan upaya untuk mengembangkan potensi wilayahnya. Kondisi kehidupan masyarakat saat ini masih diwarnai oleh kehidupan masyarakat tradisional perdesaan, dengan latar belakang pendidikan yang tidak terlalu tinggi, dan masih sangat tergantung pada sektor agraris dengan cakupan layanan paling jauh adalah layanan lokal. Mayoritas sumber daya manusia di Kelurahan Kariangau juga masih didominasi oleh tenaga kerja terlatih, hanya beberapa yang merupakan tenaga kerja terdidik. Jangkauan berpikir

masyarakat juga masih cenderung bersifat jangka pendek karena sumber penghidupannya masih bergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Sebagai konsekuensinya, akan dibutuhkan upaya keras untuk menjadikan mereka mampu masuk dalam kegiatan yang terdampak keberadaan IKN. Masyarakat baru akan mengalami perubahan orientasi hidup seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling mereka, dalam hal ini pengaruh dari pembangunan IKN. Perubahan orientasi inilah yang turut mengubah motivasi mereka dalam menjalankan profesi mereka yang mulai mengarah pada kegiatan industrial maupun *post-industry* yang mana kegiatan ini secara berangsur mulai sinkron dengan pembangunan IKN. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai merespons efek positif yang dapat dimanfaatkan dari adanya pembangunan IKN.

Terlebih setelah terbitnya UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang kemudian melahirkan Rencana Induk dalam Lampiran UU IKN yang dalam substansi muatan tersebut secara eksplisit mengarahkan Kota Balikpapan sebagai 'Otot' dalam skema Superhub Ekonomi IKN atau Ekosistem Tiga Kota pada tahap ketiga pembangunan IKN (2035-2045) untuk menjadi destinasi *Foreign Direct Investment (FDI)* pada sektor ekonomi prioritas di Indonesia. Sebagai perwujudannya, Kelurahan Kariangau akan memosisikan diri sebagai pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta terlibat dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Sektor industri yang menjadi kekuatan Kelurahan Kariangau, salah satunya adalah klaster petrokimia yang mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu serta industri pendukung pembangunan regional, yaitu agro-industri, konstruksi, dan pergudangan. Pengembangan industri petrokimia yang terletak di wilayah Kelurahan Kariangau diharapkan dapat mendukung kebutuhan akan produk bahan kimia untuk pembangunan IKN serta keperluan ekspor. Pemerintah juga perlu mengakomodasi masyarakat sekitar untuk dapat terlibat dalam proyek ini. Hal tersebut diharapkan agar dapat meminimalisir gejolak seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di wilayah Kelurahan Kariangau.

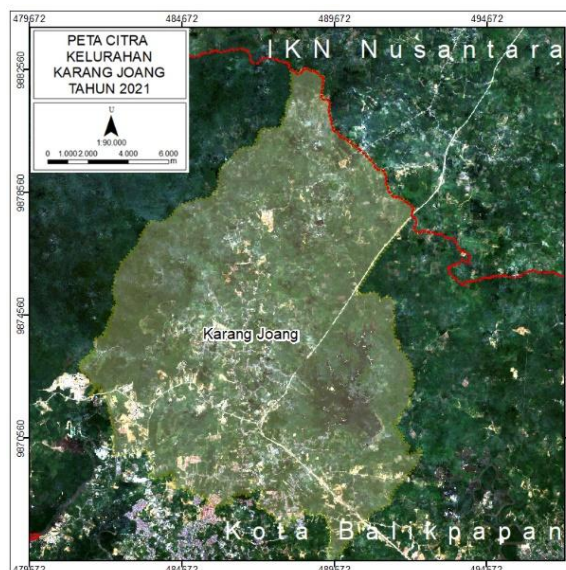
Kelurahan Karang Joang merupakan wilayah yang telah lebih dulu berada pada tahap *Initiation*. Kesiapan masyarakat yang ada di kelurahan ini mengalahkan dua kelurahan di kawasan penyangga IKN lainnya. Meskipun masyarakat masih memiliki keterbatasan informasi yang berkaitan dengan pembangunan IKN hingga dampak yang akan ditimbulkan dari adanya IKN, akan tetapi informasi yang ada sudah cukup tersedia untuk menyusun upaya masyarakat baik dari aktivitas, aksi, maupun kebijakan, hanya saja masih terbatas berdasarkan pemahaman awam mereka. Setidaknya sudah mulai terdapat antusiasme di antara para tokoh masyarakat dalam menyikapi pembangunan IKN. Sebagai kelurahan paling maju di antara 2 kelurahan di Kawasan Penyangga IKN di Kota Balikpapan yang lain (Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Teritip), Masyarakat di Kelurahan Karang Joang memiliki karakteristik masyarakat *semi-urban* yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan pertanian. Selain menjadi kelurahan paling maju, masyarakat Kelurahan Karang Joang juga menjadi yang paling siap menghadapi dampak dari pembangunan IKN.

Meskipun tergolong jauh dari pusat kota, yakni berjarak sekitar 16 km, tetapi jarak tersebut merupakan jarak terdekat dari pusat kota jika dibandingkan dengan Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Teritip. Selain itu, Kelurahan Karang Joang berada pada lokasi yang strategis dan memiliki aksesibilitas yang cukup baik sehingga mendorong tingginya mobilitas masyarakat. Di samping dilalui dan juga memiliki akses terhadap Jalan Tol Balikpapan-Samarinda serta dilalui Jalan Poros Balikpapan-Samarinda, Kelurahan Karang Joang juga dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang memadai membuat Kelurahan Karang Joang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat yang ditandai dengan mulai bermunculan pembangunan ruko-ruko, baik perkantoran maupun pertokoan.

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Teritip menjadi salah satu faktor mengapa Kelurahan Karang Joang

memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding 2 kelurahan lainnya. Fasilitas pendidikan berupa SMP dan SMA/SMK di Kelurahan Karang Joang juga banyak diisi oleh murid yang berasal dari Kelurahan Kariangau. Hal ini dikarenakan terbatasnya fasilitas pendidikan di Kelurahan Kariangau. Selain itu, di Kelurahan Karang Joang juga terdapat Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang mana menjadi tujuan pendidikan tinggi dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan, bahkan luar pulau. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa kehadiran ITK berdampak terhadap peningkatan harga tanah, perubahan jenis pekerjaan pokok, kesempatan usaha, peningkatan jumlah pendapatan, dan perubahan kepemilikan aset. Hal ini berarti bahwa pembangunan ITK berdampak positif terhadap kondisi ekonomi karena terdapat peningkatan perekonomian, akan tetapi dampak tersebut belum begitu signifikan. Wilayah Kelurahan Karang Joang, khususnya di Jl. Sungai Wain mengalami perkembangan sejak pembangunan ITK. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pendatang, khususnya mahasiswa ITK. Kondisi fisik wilayahnya juga banyak mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya konversi tutupan lahan kosong menjadi lahan terbangun. Seiring berjalannya waktu, lahan terbangun di sekitar ITK mulai didominasi oleh kegiatan pendukung Kampus ITK, seperti indekos, rumah makan, toko kelontong, fotokopi, *laundry*, dan kegiatan pendukung lainnya.

Sejauh ini, Kelurahan Karang Joang masih menjadi satu-satunya kawasan penyangga IKN di Kota Balikpapan yang memiliki akses darat secara langsung menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara dengan jarak sekitar 80 km. Untuk saat ini, aksesibilitas dan jarak ini relatif lebih dekat jika dibandingkan dari Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Teritip. Hal ini mengakibatkan Kelurahan Karang Joang menjadi Kawasan Penyangga IKN di Kota Balikpapan yang paling banyak menerima efek secara langsung dari proses pembangunan IKN. Posisi Kelurahan Karang Joang yang strategis juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kelurahan ini. Selain dilalui oleh Jalan Soekarno-Hatta yang menjadi jalan poros Balikpapan-Samarinda, Kelurahan Karang Joang juga dilalui oleh Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi V yang juga terdapat gerbang tol dan exit tol di wilayah kelurahan ini. Masyarakatpun mulai merasakan manfaat yang didapat dari adanya pembangunan IKN dan mobilitas yang dilalui melalui Jalan Poros Balikpapan-Samarinda maupun Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.



Gambar 4 Citra Kelurahan Karang Joang Tahun 2021
Sumber: Paramananda, 2023

Berdasarkan interpretasi citra pada Gambar 4, lahan terbangun di wilayah Kelurahan Karang Joang cukup luas, tetapi masih didominasi oleh vegetasi. Kepadatan penduduk di Kelurahan Karang Joang relatif mengikuti Jl. Soekarno-Hatta dan mengikuti jaringan jalan yang ada di mana cenderung menyebar ke arah barat Jl. Soekarno-Hatta. Banyaknya perumahan yang dibangun pasca pandemi Covid-19 cukup *mentrigger* berkembangnya permukiman di kelurahan ini sehingga mendorong migrasi masuk yang cukup tinggi. Hal ini juga diiringi dengan ekspansi perkantoran dan ruko yang menjalar dari selatan.

Dengan adanya rencana pembangunan IKN, sebagian masyarakat mulai memikirkan mengenai pengembangan usaha non-pertanian. Masyarakat didorong untuk mulai melihat peluang usaha perdagangan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan IKN nantinya, meskipun gambaran lebih pasti tentang jenis dan volume kebutuhan belum jelas. Oleh karena itu, sebagian kecil masyarakat sudah mulai bersiap dengan memulai usaha, sementara bagi yang sudah memiliki usaha sudah mulai memperluas layanan usaha atau bahkan membuka usaha sampingan.

Pada tahapan ini, sejumlah aktivitas yang selaras dengan pembangunan IKN telah berjalan. Masyarakat sudah mulai melakukan transformasi kegiatan menuju kegiatan yang bersifat industrial maupun *post-industry*. Selain itu, sektor jasa di Kelurahan Karang Joang telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa waktu belakangan ini, terlebih setelah Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan Kelurahan Karang Joang sebagai SPPK di Kecamatan Balikpapan Utara dan adanya rencana pengembangan kota baru Karang Joang. Kenaikan taraf hidup masyarakat juga telah menyebabkan meningkatnya permintaan atas berbagai jenis layanan seperti akomodasi, transportasi, restoran, café, layanan kesehatan, hingga keuangan. Dikarenakan sektor jasa mulai banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang mulai mengalami transformasi kehidupan menjadi masyarakat *post-industry*, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan lebih baik.

Masyarakat di Kelurahan Teritip memiliki karakteristik masyarakat perdesaan yang masih bersifat *pre-industry*. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Teritip bergerak di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti mulai dari saat pengamatan dan wawancara dilakukan hingga seluruh unit informasi dikelompokkan dalam tema, serta penghitungan skor pada Model Tingkat Kesiapan Masyarakat, dapat dikategorikan bahwa masyarakat di Kelurahan Teritip masih berada pada tahapan *Preplanning* di mana kondisi eksisting pada saat ini menggambarkan tingkat kesiapan masyarakat berada pada kondisi di mana masyarakat sudah memiliki kesadaran bahwa terdapat sesuatu yang bisa dilakukan dalam menyambut IKN. Masyarakat mulai tergerak untuk memulai kegiatan berdasarkan respons mereka terhadap pembangunan IKN. Adapun para Ketua RT dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mendorong masyarakat untuk mempersiapkan dampak yang akan ditimbulkan oleh IKN, hanya saja masih belum terlalu fokus dan rinci. Hingga saat ini belum terdapat indikasi transformasi struktural masyarakat menuju kehidupan industrial. Kondisi masyarakat di Kelurahan Teritip merupakan masyarakat perdesaan yang memiliki mobilitas rendah serta menggunakan teknologi yang masih didominasi dengan teknologi sederhana. Penghasilan utama masyarakat masih bergantung pada sektor primer dengan variasi dan inovasi yang masih terbatas. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kelurahan Teritip menyebabkan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam bersaing dengan para pendatang dari luar daerah. Faktor utama yang menyebabkan keterbatasan ini yakni dari segi pendidikan. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Teritip merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Terbatasnya fasilitas pendidikan di Kelurahan Teritip juga menyebabkan masyarakat harus menempuh pendidikan ke luar wilayah.

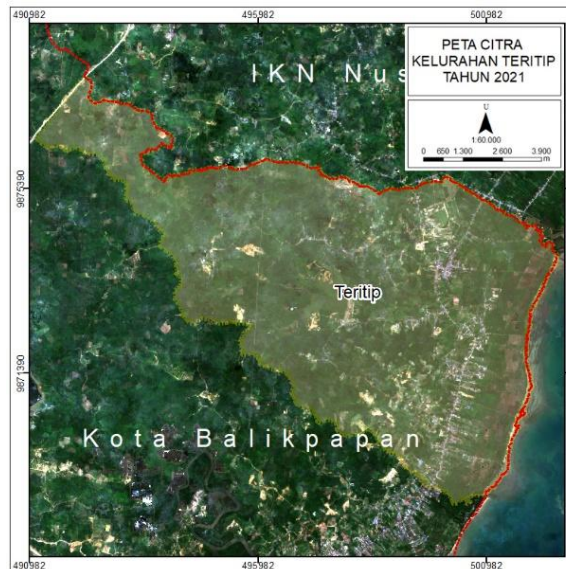
Mencermati kondisi yang ada di Kelurahan Teritip, terlihat bahwa sektor pertanian dan perkebunan masih mendominasi struktur ekonomi kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa

sektor-sektor tersebut secara teoritik tidak memiliki kapasitas untuk membangkitkan kegiatan ikutan di hulu sehingga untuk upaya pengembangan kawasan lebih banyak bertumpu kepada pengembangan kegiatan ikutan di hilir dalam bentuk diversifikasi komoditas beserta produk turunannya. Mengingat bahwa dari masa kini hingga dimulainya tahap pembangunan IKN dukungan kelembagaan untuk menghasilkan inovasi kegiatan produksi minim, maka upaya untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi berbasis sektor pertanian dan perkebunan dilakukan dengan menggunakan dukungan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal pada gilirannya akan mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wilayah yang di Kelurahan Teritip.

Sebagai kelurahan yang letaknya paling jauh dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN menjadikan Kelurahan Teritip sebagai kawasan penyangga IKN yang paling minim terdampak keberadaan IKN jika dibandingkan dengan Kelurahan Karang Joang dan Kelurahan Kariangau. Secara administratif, Kelurahan Teritip merupakan kelurahan terjauh terhadap Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dibanding Kelurahan Karang Joang dan Kelurahan Kariangau. Namun berdasarkan jarak menggunakan infrastruktur eksisting, Kelurahan Teritip sendiri berjarak sekitar 81 km dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Jarak ini sebenarnya tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Karang Joang untuk sementara waktu ini. Akan tetapi, posisi Kelurahan Teritip yang cenderung berada di ujung pesisir dan tidak memiliki akses langsung terhadap Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dinilai kurang strategis. Secara psikologis, masyarakatpun merasa bahwa keberadaan IKN sangat jauh dengan wilayah mereka sehingga tidak akan terkena dampak secara langsung dari adanya IKN. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek spasial mempengaruhi kesadaran kolektif masyarakat yang ada di Kelurahan Teritip.

Dengan beroperasinya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi V membuat Kelurahan Teritip semakin jarang diakses. Secara eksisting, Kelurahan Teritip berada pada lokasi yang kurang strategis karena cenderung jauh dari pusat kota dan terletak di ujung timur laut Kota Balikpapan di mana hanya terdapat satu jalan utama, yakni Jl. Mulawarman yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan wilayah Kecamatan Samboja. Adapun jarak Kelurahan Teritip terhadap pusat kota di Kecamatan Balikpapan Kota kurang lebih 25 km. Jarak ini merupakan yang terjauh jika dibandingkan dengan Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Karang Joang. Selain itu, *demand* yang ada di Kelurahan Teritip maupun wilayah di sekitarnya dinilai masih sangat kurang. Konektivitas yang relatif rendah melalui Jl. Mulawarman saja sebagai satu-satunya jalan utama membuat pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Teritip cenderung lambat. Ekspansi lahan terbangun di Kelurahan Teritip juga tidak semasif yang terjadi di Jalan Poros Balikpapan-Samarinda di Kelurahan Karang Joang. Hal ini diperkuat dengan citra Kelurahan Teritip tahun 2021 yang menunjukkan bahwa lahan terbangun di Kelurahan Teritip cenderung terkonsentrasi sepanjang Jl. Mulawarman dan mengikuti jaringan jalan yang semakin ke arah barat semakin mengerucut.

Dengan luasan wilayah yang tidak seluas Kelurahan Karang Joang dan Kelurahan Kariangau, dari citra pada Gambar 5 dapat diasumsikan pula proporsi antara vegetasi dan lahan terbangun tidak seanjlok di Kelurahan Kariangau ataupun Kelurahan Karang Joang sehingga kepadatan penduduk di Kelurahan Teritip menjadi yang tertinggi di antara 2 kelurahan tersebut. Namun, tingginya kepadatan penduduk tersebut tidak mendorong adanya transformasi struktural karena mayoritas hanya bergantung kegiatan pertanian ekstraktif dan belum mengarah pada sektor industri maupun jasa. Migrasi masuk ke Kelurahan Teritip juga cenderung rendah karena belum memiliki daya tarik atau pusat pertumbuhan, meskipun sudah berstatus sebagai SPPK di Kecamatan Balikpapan Timur.



Gambar 5 Citra Kelurahan Teritip Tahun 2021
Sumber: Paramananda, 2023

Kesiapan masyarakat yang ada di Kelurahan Teritip cenderung tertinggal dibanding Kelurahan Karang Joang dan Kelurahan Kariangau. Hal ini disebabkan karena lokasi Kelurahan Teritip sangat jauh dari Kawasan Pusat Inti Pemerintahan (KIPP) IKN, bahkan terlampaui jauh dari pusat Kota Balikpapan. Di samping itu, Kelurahan Teritip juga tidak memiliki akses terhadap jalan utama menuju Kawasan Pusat Inti Pemerintahan IKN, bahkan tidak terhubung dengan Kelurahan Karang Joang meskipun berbatasan langsung dengan Kelurahan Karang Joang. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, masyarakat di Kelurahan Teritip dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menyambut dampak dari adanya IKN. Perubahan signifikan terhadap komposisi masyarakat dengan adanya IKN menuntut adaptasi masyarakat yang ada di Kelurahan Teritip sehingga sulit untuk berharap adanya kesiapan terhadap dampak IKN secara optimal jika pemerintah masih menerapkan kebijakan *as usual*.

Berkaitan dengan kekhawatiran terhadap pembangunan IKN, masyarakat di Kelurahan Teritip didominasi dengan kategori tidak khawatir. Masyarakat menyadari terhadap dampak yang akan timbul nantinya. Tetapi kekhawatiran tersebut belum mendorong masyarakat untuk mempersiapkan diri. Terdapat pula masyarakat di Kelurahan Teritip yang tidak merasa khawatir karena tidak merasa terkena dampak dari pembangunan IKN dan tidak ingin mencari tahu mengenai informasi tersebut. Bahkan mayoritas masyarakat di Kelurahan Teritip tidak mengetahui bahwa secara administratif, wilayahnya berbatasan dengan IKN Nusantara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kesiapan masyarakat di ketiga kelurahan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat telah memiliki tingkat kesiapan yang relatif masih rendah terhadap pembangunan IKN. Terdapat perbedaan karakteristik masyarakat pada ketiga lokasi penelitian. Secara umum, masyarakat di Kelurahan Karang Joang mulai mengarah pada sektor perdagangan dan jasa, sedangkan masyarakat di Kelurahan Kariangau masih transisi menuju masyarakat *industrial*, sementara itu, masyarakat di Kelurahan Teritip masih berfokus pada kegiatan *pre-industry* seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, aksesibilitas dan kedekatan dengan lokasi IKN juga berpengaruh dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat, sebagai contoh Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Karang Joang yang secara spasial relatif lebih dekat dengan IKN sehingga masyarakat cenderung lebih siap merespons pembangunan IKN. Berbeda halnya dengan Kelurahan Teritip, meskipun berbatasan langsung

dengan IKN tetapi memiliki aksesibilitas yang relatif lebih sulit dan paling jauh dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN sehingga masyarakat cenderung belum siap, bahkan sejauh ini belum merasakan dampak apapun dari keberadaan IKN. Dengan demikian, Kelurahan Karang Joang menjadi wilayah yang paling siap terhadap pembangunan IKN dengan tingkat kesiapan masyarakat yang berada pada tingkat ke-6 yakni di tahap *Initiation*, disusul Kelurahan Kariangau berada pada peringkat kedua di mana tingkat kesiapan masyarakat di wilayah ini berada pada tingkat ke-5 yakni di tahap *Preparation*. Sementara itu, Kelurahan Teritip merupakan wilayah yang paling belum siap menghadapi pembangunan IKN di mana tingkat kesiapan masyarakat di kelurahan ini berada pada tingkat ke-4 yakni *Preplanning*. Kondisi ini dapat ditingkatkan lagi dengan adanya peran pemerintah dalam membangun masyarakat yang ada di ketiga kelurahan ini.

REKOMENDASI

Pemerintah dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan jenjang pendidikannya hingga perguruan tinggi atau mengembangkan kemampuan vokasional dengan memberikan pendidikan dan pelatihan secara optimal dalam penyediaan tenaga kerja terampil dan bersertifikasi yang dibina langsung oleh Balai Latihan Kerja (BLK) secara profesional atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Balikpapan. Upaya tersebut juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kompetensi masyarakat dapat menyesuaikan kebutuhan industri sehingga terjadi kesesuaian antara *supply* dengan *demand* tenaga kerja yang diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya *mismatching*. Pemerintah juga dapat memfasilitasi program untuk masyarakat agar dapat mengembangkan jenis usaha baru, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar. Dengan munculnya banyak pelaku usaha baru otomatis akan memicu persaingan yang menuntut para pelaku usaha tersebut untuk lebih inovatif dalam memasarkan produknya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai dampak pembangunan IKN terhadap Kota Balikpapan dan peran dari kawasan penyangga, yakni di ketiga kelurahan tersebut sebagai wilayah yang berbatasan secara administratif dengan IKN agar masyarakat memiliki pandangan yang luas ke depan serta dapat menumbuhkan *sense of belonging* masyarakat di ketiga kelurahan tersebut terhadap kemajuan ekonomi di wilayahnya dalam rangka merespons pembangunan IKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurumbita, Yuke Nori. (2015). Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan. (2022). *Kajian Pengembangan Kota Balikpapan Bagian sebagai Beranda Ibu Kota Negara*. Balikpapan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Kajian Awal Aspek Sosial IKN*. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022*. Balikpapan: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan.
- Bagus, N. (2019). Hubungan Antara Pembangunan Infrastruktur dan Kemampuan Usaha Masyarakat. In *Reformasi* (Vol. 9, Issue 2, p. 174).
- Dewi, Maulida Rachamlia, Syafitri, E. D., dan Dewanti, A.N. (2020). Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *Jurnal*. Balikpapan: Institut Teknologi Kalimantan.
- Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. (2021). *Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Balikpapan Tahun 2021*. Balikpapan: Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
- Edward, R. W. (2000). Community Readiness: Reserach to Practice. *Jurnal of Community Psychology*, No.28, hal: 291–307.

- Idajati, H., Pamungkas, A., dan Kukinul, Vely S. (2016). The Level of Participation in Mangrove Ecotourism Development, Wonorejo Surabaya. *Journal Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 227, 14 July 2016, Pages 515-520.*
- Kurniawati, S., dan Asyurrahman. (2018). Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Prosiding SATIESP FEB Universitas Tanjungpura.
- Makhmudi, Dyah Putri dan Muktiali, Mohammad. (2018). *Jurnal Pengembangan Kota Volume 6 No. 2 (108–117).*
- Muta'ali, Luthfi dan Sahamony, Anugerah. (2019). *Pemindahan Ibu Kota Tinjauan Geografis.* Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE) UGM.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2012). Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 7 Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2012). Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2012). Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2021). RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
- Plested, Barbara A., Edwards, Ruth W., dan Thurman, Pamela Jumper. (2006). *Community Readiness: A Handbook for Successful Change.* Colorado: Colorado State University.
- Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional. (2020). Penyusunan Konsep Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN). *Laporan Kegiatan.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sassen, Saskia. (2000). *Cities in a World Economy – Second Edition, Ch. 1 Places and Production in the Global Economy, The New Inequalities within Cities.* Los Angeles: Sage Publishing.
- Savitch, H. V. & Kantor, P. (2002). *Cities in the International Marketplace. The Political Economy of Urban Development in North America and Western Europe.* Princeton: Princeton University Press.
- Yin, R. K. (2011). *Studi Kasus Desain dan Metode (Cetakan 10).* Jakarta: Rajawali Pers.